DOI: https://doi.org/10.30647/jpp.v30647/jpp.v7i2.1925

Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

Linda Marlince Taka*, Habel Ada Koinmanas, Selus P. Kellin

Universitas Citra Bangsa
*lindataka2709@gmail.com

Informasi Artikel
Dikirim : 12 Juli 2025
Diterima : 2 Desember 2025
Dipublikasi: 10 Desember 2025

Keywords:
tourism village, training, tourism policy, community empowerment, Belu Regency

Abstract
Belu Regency, located in East Nusa Tenggara Province, holds significant potential for community-based tourism development, supported by its rich natural landscapes, cultural heritage, and local wisdom. However, the lack of human resource capacity at the village level remains a major challenge in managing tourism potential professionally and sustainably. This training program aimed to enhance the knowledge and skills of village communities in managing tourism villages through two main topics: (1) Regional Tourism Development Policies and Programs, and (2) Tourism Villages within the Tourism System.The training was conducted over three days using participatory methods and involved 35 participants from eight potential tourism villages in Belu. The results indicated a significant increase in participants' understanding of regional tourism policies and community-based tourism governance. Participants actively engaged in simulations of tourism village profiling and the preparation of annual work plans. A concrete outcome was the establishment of the Belu Tourism Village Communication Forum as a platform for collaboration and follow-up actions. This activity demonstrated that structured and contextual training can foster critical awareness and encourage active community participation in village tourism development. A key recommendation from this program is the need for continuous mentoring by local government and universities to ensure consistent and impactful implementation at the grassroots level.

Kata Kunci:
desa wisata, pelatihan, kebijakan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Belu

Abstrak
Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis desa, didukung oleh kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal. Namun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi tantangan utama dalam mengelola potensi tersebut secara profesional dan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam pengelolaan desa wisata melalui dua materi utama: (1) Kebijakan dan Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, dan (2) Desa Wisata dalam Sistem Kepariwisataan. Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari dengan metode partisipatif, melibatkan 50 peserta dari delapan desa potensial wisata di Kabupaten Belu. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kebijakan kepariwisataan daerah dan tata kelola desa wisata berbasis komunitas. Peserta juga aktif dalam simulasi penyusunan profil desa wisata dan rencana kerja tahunan, serta membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata sebagai tindak lanjut konkret. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan yang terstruktur dan kontekstual mampu membangun kesadaran kritis dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pariwisata desa. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah perlunya pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memastikan implementasi yang konsisten dan berdaya guna di tingkat akar rumput.

PENDAHULUAN

Kabupaten Belu, yang terletak di bagian barat Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah yang kaya akan potensi pariwisata baik dari aspek alam, budaya, maupun sejarah. Keindahan alam yang dimiliki seperti kawasan pegunungan, garis pantai yang eksotis, hutan tropis, serta situs-situs budaya dan sejarah menjadi aset penting dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Selain itu, keberagaman budaya lokal, upacara adat, tenun ikat khas Belu, serta kehidupan masyarakat tradisional yang masih lestari, memberikan nilai tambah yang menjadikan Kabupaten Belu sebagai destinasi yang unik dan otentik.

Namun demikian, potensi yang ada belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Salah satu penyebab utama adalah belum berkembangnya tata kelola destinasi wisata yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama di tingkat desa. Padahal, konsep desa wisata yang berbasis pada pelibatan aktif masyarakat lokal telah terbukti menjadi model pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di banyak daerah lain di Indonesia. Di Kabupaten Belu sendiri, banyak desa sebenarnya memiliki daya tarik wisata, namun belum tergarap secara sistematis sebagai produk wisata yang dapat dijual dan dipromosikan secara luas. Pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam pengembangan desa wisata, di mana keberhasilan destinasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kapasitas komunitas lokal dalam mengelola potensi wisata secara mandiri (Devi & Rahaju, 2025).

Tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dalam memahami dan menjalankan pengelolaan desa wisata yang profesional. Di Kabupaten Belu sendiri, banyak desa sebenarnya memiliki daya tarik wisata, namun belum tergarap secara sistematis sebagai produk wisata yang dapat dijual dan dipromosikan secara luas Sebagian besar masyarakat desa belum mendapatkan pelatihan atau pendampingan mengenai manajemen destinasi wisata, pelayanan tamu, pengemasan paket wisata, promosi digital, maupun prinsip keberlanjutan dalam pariwisata. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pengelolaan potensi wisata seringkali dilakukan secara sporadis, tanpa strategi jangka panjang, dan kurang memperhatikan daya dukung sosial-budaya serta lingkungan.

Selain persoalan SDM, hambatan lain juga datang dari sisi infrastruktur pendukung yang masih minim, seperti akses jalan menuju lokasi wisata, fasilitas kebersihan dan keamanan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi informasi. Promosi destinasi pun belum optimal, mengingat banyak desa wisata belum memiliki platform digital maupun jejaring kemitraan yang luas untuk menarik kunjungan wisatawan. Hal ini membuat potensi besar yang dimiliki Kabupaten Belu belum bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Padahal, konsep desa wisata yang berbasis pada pelibatan aktif masyarakat lokal telah terbukti menjadi model pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di banyak daerah lain di Indonesia. Dalam perspektif pengembangan destinasi, Cooper et al. (2008) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah destinasi sangat ditentukan oleh integrasi komponen atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta organisasi (4A) yang dikelola secara profesional dan partisipatif.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat desa untuk membangun kapasitas dan memperkuat kelembagaan pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, Program Studi DIV Pengelolaan Perhotelan Universitas Citra Bangsa, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, merancang sebuah kegiatan pelatihan terpadu yang ditujukan bagi perwakilan masyarakat desa dan pelaku pariwisata lokal. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata berbasis

komunitas dan prinsip keberlanjutan, serta keterampilan teknis seperti hospitality, pemasaran digital, dan pembuatan paket wisata.

Berbagai kegiatan PKM yang telah dipublikasikan sebelumnya menunjukkan bahwa desa wisata dapat berkembang secara signifikan apabila masyarakat diberdayakan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tambahani et al. (2023) membuktikan bahwa pemetaan potensi, perbaikan sarana, serta penerapan teknologi pendukung dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan destinasi dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Utami et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan paket wisata dan promosi digital meningkatkan kapasitas Pokdarwis sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM dan penyedia jasa wisata. Pendit et al. (2024) semakin menguatkan bahwa pelatihan manajemen desa wisata dan pengembangan produk lokal menjadi elemen penting untuk mempersiapkan komunitas menghadapi kebutuhan industri pariwisata, sementara Rudiyanto (2024) menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dasar kepariwisataan memberi dampak langsung pada kesiapan masyarakat dalam mengelola destinasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, PKM Lase & Jatmika (2024) dan Febrianto & Utama (2022) menunjukkan relevansi pentingnya penguatan kapasitas digital bagi desa wisata, terutama dalam hal promosi dan penyediaan informasi bagi wisatawan. Pembangunan website dan pelatihan pengelolaan konten terbukti meningkatkan akses informasi, memperluas jangkauan promosi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam memasarkan potensi desa. Semua temuan ini secara keseluruhan memberikan dasar yang kuat bahwa pelatihan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Belu sangat relevan dilakukan. Dengan mengadopsi pendekatan yang telah terbukti berhasil dimulai dari pemetaan potensi, penguatan kapasitas SDM, pendampingan UMKM, hingga digitalisasi promosi, PKM ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat tata kelola destinasi, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu menjadi pemicu awal untuk meningkatkan kesiapan masyarakat desa dalam mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional. Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM, terbukanya wawasan, serta dukungan kelembagaan yang kuat, maka pengembangan desa wisata di Kabupaten Belu dapat diarahkan menjadi lebih strategis, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas utama daerah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menggunakan metode pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan desa wisata kepada pengurus desa, anggota Pokdarwis, tokoh adat, pengelola BUMDes, serta perwakilan generasi muda dari masing-masing desa di Kabupaten Belu , Nusa Tenggara Timur, melalui pelatihan pengelolaan desa wisata. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan pengabdian ini melibatkan tiga tahapan utama yaitu persiapan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi. Sebagai bagian dari metode ini, PKM ini mengadopsi pendekatan partisipatif di mana pelaku usaha akan dilibatkan langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Metode ini dipilih berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan pelatihan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas pelatihan bagi pelaku pengelola desa wisata.

Data dalam PKM ini dikumpulkan menggunakan dua teknik utama yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipatif . Wawancara dilakukan untuk menggali

informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengelola usaha mereka sebelum pelatihan, serta untuk mendapatkan feedback mengenai pengalaman mereka setelah mengikuti pelatihan. Teknik observasi partisipatif digunakan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan pelatihan dan interaksi antara fasilitator dan peserta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh, di mana semua pelaku yang terlibat dalam pengeloaaan desa wisata, yang berjumlah 25 orang, dijadikan sampel.

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber data, yaitu dengan mengkombinasikan wawancara dengan observasi lapangan serta menggunakan data dokumentasi dari catatan transaksi keuangan pelaku usaha. Keandalan data dijaga dengan melakukan uji coba instrumen wawancara dan observasi pengurus desa, anggota Pokdarwis, tokoh adat, pengelola BUMDes, serta perwakilan generasi muda dari masing-masing desa yang tidak termasuk dalam sampel utama. Teknik ini telah terbukti efektif dalam memastikan data yang diperoleh relevan dan konsisten. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana hasil wawancara dan observasi akan dikategorikan dan dianalisis untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan pemahaman dan implementasi pengeloaan desa wisata di kalangan pengurus desa, anggota Pokdarwis, tokoh adat, pengelola BUMDes, serta perwakilan generasi muda dari masing-masing desa.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Hotel Timor Atambua Nusa Tenggara Timur , yang yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Pelaksanaan kegiatan dari tanggal 21-23 November 2024 . Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan pada hari terakhir untuk melihat potensi dan pengelolaan desa wisata yang sudah berjalan di desa wisata Fulan Fehan sehingga bisa menjadi standar dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata selanjutnya.

Sebelum pelaksanaan pelatihan, sebagian besar peserta di Kabupaten Belu belum memiliki pemahaman dan pengetahuan, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengelola desa wisata. Beberapa pelaku usaha bahkan belum melakukan kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata sama sekali. Berdasarkan pengamatan awal, hal ini menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata. Program pelatihan diharapkan dapat memberikan pemahaman, peningkatan pengetahuan, motivasi dan kompetensi yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan suatu desa wisata agar lebih professional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah meningkatnya kemampuan para peserta dalam mengelola desa wisata dari berbagai faktor terutama adanya kolaborasi antar pelaku usaha dan stakeholder terkait, yang akan berujung pada pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 November 2024, di Hotel Timor Kabupaten Belu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu dan Program Studi DIV Pengelolaan Perhotelan Universitas Citra Bangsa. Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari delapan desa yang telah ditetapkan sebagai desa potensial wisata oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Peserta terdiri atas pengurus desa, anggota Pokdarwis, tokoh adat, pengelola BUMDes, serta perwakilan generasi muda dari masing-masing desa.

Metode pelatihan menggabungkan pendekatan andragogy dan partisipatif (pendidikan orang dewasa) dengan metode yang menurut Rahmat & Apriliani (2022)

merupakan pendekatan efektif dalam penguatan kapasitas masyarakat desa wisata karena menempatkan warga sebagai pelaku utama proses pembelajaran. Peserta mengikuti ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktik sederhana terkait pengelolaan desa wisata. Setiap materi disampaikan dengan kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik lapangan sederhana. Dalam sesi awal, peserta diminta untuk mengisi kuisioner pre-test guna mengukur pengetahuan awal terkait topik yang akan diberikan. Setelah rangkaian pelatihan selesai, dilakukan pula post-test dan refleksi kelompok untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta berkembang.



Gambar 1. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata
Sumber: Tim PKM (2024)

Hasil Pelatihan Materi I: Kebijakan dan Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Materi pertama difokuskan pada pemahaman peserta terhadap kerangka kebijakan pembangunan pariwisata daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan desa wisata. Narayang merupakan Akademisi dari Universitas Citra Bangsa Program Studi Pengelolaan Perhotelan menyampaikan bahwa arah kebijakan pariwisata di Kabupaten Belu mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2021–2025, yang secara eksplisit mencantumkan desa wisata sebagai salah satu pilar utama pengembangan destinasi. Beberapa poin penting dalam sesi ini antara lain: (1) Penjelasan tentang struktur dan fungsi RIPPARDA sebagai acuan pembangunan sektor pariwisata; (2) Strategi pembangunan desa wisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal; (3) Skema pendanaan, insentif, dan program prioritas Pemda untuk desa wisata; (4) Penekanan pada pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes) dengan kebijakan pariwisata kabupaten.

Dari hasil pre-test, hanya 6 dari 50 peserta (11%) yang mengetahui secara pasti adanya RIPPARDA dan fungsinya. Namun, setelah pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan: 44 peserta (86%) dapat menjelaskan secara garis besar isi dan arah kebijakan kepariwisataan daerah. Diskusi juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa termotivasi untuk menyusun rencana kerja yang lebih terarah dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.

Peningkatan ini sejalan dengan temuan Rudiyanto (2024) yang menyebutkan bahwa edukasi kebijakan pariwisata dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam pengelolaan destinasi secara mandiri dan terarah. Pelatihan ini mengubah persepsi awal peserta bahwa kebijakan hanya bersifat administratif. Peserta mulai memahami bahwa kebijakan juga membuka ruang partisipasi desa, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Salah satu hasil langsung dari pelatihan ini adalah terbentuknya komitmen dari lima desa peserta untuk merevisi RPJMDes agar

menyertakan program strategis pengembangan desa wisata.

Hasil Pelatihan Materi II : Desa Wisata Dalam Kepariwisataan

Materi kedua membahas secara mendalam posisi desa wisata dalam sistem kepariwisataan yang holistik. Narasumber dari akademisi dan praktisi pariwisata menjelaskan bahwa desa wisata bukanlah sekadar tempat kunjungan, melainkan bagian penting dari ekosistem pariwisata yang mencakup atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan dukungan kelembagaan (4A). Pokok-pokok materi yang diberikan meliputi: (1) Definisi dan kriteria desa wisata menurut Kemenparekraf RI; (2) Komponen utama desa wisata: atraksi (alam, budaya, buatan), amenitas (akomodasi, MCK, pusat informasi), dan aksesibilitas; (3) Kelembagaan desa wisata: peran Pokdarwis, BUMDes, karang taruna, dan tokoh adat; (4) Hubungan desa wisata dengan pelaku lain di sektor pariwisata (agen perjalanan, pemerintah, media, pelaku ekonomi kreatif); (5) Strategi branding dan digitalisasi promosi desa wisata.

Dalam sesi praktik, peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk memetakan potensi desa masing-masing menggunakan alat bantu analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal). Kelompok dari Desa Duarato memetakan potensi wisata alam dan ritual adat tahunan, sementara kelompok dari Desa Fulan Fehan merancang paket wisata harian berbasis pengalaman budaya (wisata tinggal bersama keluarga adat, pelatihan menenun, dan kuliner lokal).

Sebagian besar peserta (92%) melaporkan peningkatan pemahaman tentang peran kelembagaan desa, termasuk Pokdarwis dan BUMDes Wisata. Hal ini sejalan dengan Rohaeli et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal dan kemampuan kelompok masyarakat dalam mengelola atraksi dan layanan.

Partisipasi Aktif Masyarakat Selama Kegiatan Pelatihan

Keterlibatan aktif peserta menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata yang dilaksanakan di Kabupaten Belu. Sejak hari pertama pelatihan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi, tidak hanya dalam menerima materi, tetapi juga dalam sesi diskusi, tanya jawab, simulasi, dan praktik kelompok. Kehadiran dan Komitmen Peserta, seluruh peserta hadir secara penuh selama tiga hari pelatihan tanpa ada yang meninggalkan sesi. Tingkat kehadiran mencapai 100%, yang menunjukkan keseriusan dan komitmen peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan, beberapa peserta datang lebih awal untuk berdiskusi informal dengan fasilitator, serta aktif mencatat poin-poin penting selama pemaparan materi.

Kontribusi dalam diskusi dan tanya jawab, dalam setiap sesi, peserta secara aktif mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman di desanya masing-masing, dan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Topik yang paling banyak memicu diskusi adalah kebijakan alokasi anggaran desa untuk pengembangan wisata, serta keterlibatan perempuan dan pemuda dalam kelembagaan desa wisata. Antusiasme ini menunjukkan adanya keingintahuan dan keterbukaan peserta terhadap perspektif baru dalam pengelolaan desa wisata.

Partisipasi dalam Simulasi dan Praktik Kelompok, selama sesi praktik pemetaan potensi dan penyusunan rencana paket wisata, peserta dibagi dalam kelompok berdasarkan wilayah asal. Masing-masing kelompok menunjukkan kreativitas dan kekompakan dalam menyusun presentasi potensi wisata desanya. Misalnya, kelompok dari Desa Maumutin merancang skenario paket wisata berbasis ritual adat dan tenun

tradisional, sementara kelompok dari Desa Fatuketi menonjolkan potensi wisata alam dan petualangan. Peserta aktif berdiskusi, menggambar peta potensi desa, serta menampilkan simulasi promosi destinasi. Penguatan Kapasitas Komunal, beberapa peserta secara sukarela menjadi juru bicara kelompok, memimpin diskusi, dan membantu peserta lain yang kurang terbiasa dengan konsep-konsep baru. Ini menunjukkan bahwa pelatihan juga mendorong terbentuknya jejaring kolaboratif antar desa. Salah satu peserta dari Desa Lidak bahkan mengusulkan agar dibentuk Forum Desa Wisata sebagai wadah koordinasi berkelanjutan pasca pelatihan.

Tindak Lanjut Nyata, sebagai bentuk konkret dari peran aktif mereka, peserta dari lima desa menyatakan komitmen tertulis untuk: Menyusun profil potensi wisata desa, Mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk pembentukan kelembagaan Pokdarwis atau BUMDes Wisata, Mengadakan sosialisasi internal kepada perangkat desa dan masyarakat terkait hasil pelatihan.

Sikap Reflektif dan Kesadaran Kritis, dalam sesi refleksi akhir, peserta menunjukkan sikap reflektif dengan menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di desa, seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya terhadap wisatawan luar, hingga kekhawatiran terhadap perubahan sosial. Namun mereka juga menyampaikan bahwa pelatihan ini membantu mereka memahami bahwa desa wisata bukan sekadar "tempat yang dikunjungi", tetapi sebagai ruang hidup yang bisa tumbuh secara ekonomi, sosial, dan budaya bila dikelola secara bijak dan partisipatif.

Peran aktif peserta selama pelatihan mencerminkan kesiapan dan potensi masyarakat desa di Kabupaten Belu untuk terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas. Antusiasme, partisipasi kolektif, serta keinginan untuk bertindak nyata menjadi modal sosial yang penting bagi keberlanjutan program pengembangan desa wisata ke depan.



Gambar 2. Diskusi dan Presentasi Desa Wisata Mempraktekkan
Sumber: Tim PKM (2024)



Gambar 2. Kunjungan ke Desa Wisata Mauhalek
Sumber: Tim PKM (2024)

Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Belu, seluruh peserta berkomitmen untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh ke dalam rencana pengembangan desa masing-masing. Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun profil potensi wisata desa secara partisipatif yang mencakup atraksi alam, budaya, kuliner, serta sarana penunjang lainnya. Profil ini akan menjadi dasar untuk menyusun program desa wisata dan memetakan daya tarik unggulan yang siap dikembangkan dan dipromosikan.

Selanjutnya, peserta pelatihan akan mendorong pembentukan atau penguatan kelembagaan desa wisata seperti Pokdarwis dan BUMDes Wisata, serta melakukan sosialisasi internal kepada masyarakat desa, khususnya kelompok pemuda, perempuan, dan tokoh adat agar terlibat aktif dalam pengelolaan pariwisata secara kolektif. Masing-masing desa akan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mencakup kegiatan pelatihan lanjutan, penyusunan paket wisata, promosi digital, dan penguatan kapasitas layanan wisata. Kegiatan ini akan dikawal bersama antara peserta, aparat desa, dan pendamping dari Dinas Pariwisata.

Sebagai bentuk kolaborasi lintas wilayah, peserta juga menyepakati pembentukan Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Belu untuk memperkuat jejaring, berbagi praktik baik, serta menyelenggarakan kegiatan bersama seperti festival budaya atau kunjungan studi banding. Forum ini akan menjadi wadah koordinasi antar-desa wisata dan sekaligus memperkuat suara masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dan potensi lokal ke tingkat kabupaten. Pendampingan dan monitoring berkala dari pihak Dinas Pariwisata serta Universitas Citra Bangsa akan dilakukan setiap triwulan untuk memastikan keberlanjutan program dan efektivitas implementasi rencana tindak lanjut di tingkat desa.

Tabel 1 Hasil Pre Test Peserta PKM

No	Indikator Penilain	Skor Rata-rata (0-100)	Kategori
1.	Pemahaman konsep dasar desa wisata	52	Cukup
2.	Pengetahuan pengelolaan amenitas & atraksi	48	Kurang
3.	Pengetahuan manajemen SDM & layanan wisata	50	Cukup
4.	Pengetahuan pemasaran digital desa wisata	42	Kurang
5.	Pemahaman prinsip keberlanjutan (sosial, budaya, ekonomi, lingkungan)	46	Kurang

Sumber: Tim PKM (2024)

Tabel 2 Hasil Post Test Peserta PKM

No	Indikator Penilain	Skor Rata-rata (0-100)	Kategori
1.	Pemahaman konsep dasar desa wisata	80	Baik
2.	Pengetahuan pengelolaan amenitas & atraksi	80	Baik
3.	Pengetahuan manajemen SDM & layanan wisata	85	Baik
4.	Pengetahuan pemasaran digital desa wisata	82	Baik
5.	Pemahaman prinsip keberlanjutan (sosial, budaya, ekonomi, lingkungan)	84	Baik

Sumber: Tim PKM (2024)

Tabel pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan Pelatihan

Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sebelum pelatihan, mayoritas peserta memiliki tingkat pengetahuan yang masih berada pada kategori kurang hingga cukup, terutama pada aspek pemasaran digital dan prinsip keberlanjutan desa wisata. Namun, setelah mengikuti rangkaian materi, diskusi, dan praktik lapangan, seluruh indikator mengalami peningkatan skor yang konsisten hingga mencapai kategori baik, dengan kenaikan rata-rata 30–40 poin. Hasil ini mencerminkan efektivitas program pengabdian masyarakat dalam memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata serta meningkatkan kesiapan masyarakat lokal dalam mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pelatihan Pengelolaan desa wisata di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan pengelolaan keuangan pelaku usaha. Pelatihan ini secara efektif menanggapi masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di desa wisata, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pembukuan dan pencatatan transaksi yang terstruktur. Metode yang diterapkan, yaitu pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku usaha secara aktif dalam setiap tahapan, terbukti sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan peningkatan kemampuan dalam melakukan pembukuan sederhana, pelaku usaha kini dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih efisien, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha mereka di pasar lokal maupun global.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pendekatan digital, partisipatif, dan berbasis lokal sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa terhadap pentingnya pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun pelatihan berlangsung singkat, transformasi cara pandang peserta terhadap potensi desanya cukup signifikan.

Namun demikian, keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada tindak lanjut kelembagaan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah serta sinergi antar-pemangku kepentingan. Tanpa pendampingan lanjutan, dikhawatirkan semangat peserta akan menurun, dan potensi yang telah teridentifikasi tidak berkembang menjadi produk wisata konkret.

KONFLIK KEPENTINGAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan desa wisata ini merupakan bentuk kolaborasi akademis dan pemberdayaan masyarakat antara Universitas Citra Bangsa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, serta perwakilan masyarakat dari desa-desa potensial wisata. Materi dan proses pelatihan diarahkan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan kepariwisataan, tata kelola destinasi, pengembangan potensi lokal, dan pembentukan jejaring antardesa, tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau pihak tertentu. Pembentukan Forum Komunikasi Desa Wisata juga dimaksudkan sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi bagi para peserta, bukan sebagai sarana untuk memberikan keuntungan khusus kepada individu maupun lembaga tertentu. Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan yang memengaruhi pertimbangan akademis, pelaksanaan program, maupun interpretasi hasil kegiatan yang dilaporkan dalam artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Penyusunan naskah artikel ini mengutamakan hasil kegiatan lapangan,

dokumentasi pelatihan, interaksi dengan peserta, serta data evaluasi yang dihimpun oleh tim pengabdian. Apabila teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) digunakan selama proses penulisan, penggunaannya terbatas pada dukungan teknis, seperti penyempurnaan tata bahasa, penyesuaian istilah, dan peningkatan keterbacaan uraian ilmiah. AI tidak digunakan sebagai sumber pengganti bagi informasi lapangan, tidak diberi kewenangan untuk menghasilkan data pre-test dan post-test, serta tidak menggantikan proses analisis dan penilaian tim terhadap capaian pelatihan. Penulis tetap memegang tanggung jawab penuh dalam memverifikasi setiap informasi, memastikan kesesuaian hasil yang disajikan dengan bukti kegiatan, dan menjamin akuntabilitas isi publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice* (4th ed.). Pearson Education.

Devi, S. S., & Rahaju, T. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Simathani Marurup Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 24-51. DOI: https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.261

Febrianto, I. G. A., & Utama, I. P. (2022). Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Gunung Salak, Kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 2(2), 89-96. DOI: 10.52352/makardhi.v2i2.787

Kemenparekraf RI. (2021). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2021–2025*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Lase, K. J. D., & Jatmika. (2024). Menggali Potensi Lokal Pembangunan Website Untuk Mendorong Pariwisata Desa Wisata Purwomartani. *KIFEST: Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraat*, 1(1)**,** 35–46. http://journal.ukrim.ac.id/index.php/kifest/article/view/662

Rahmat, T., & Apriliani, D. (2022). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Sustainability Tourism Dalam Perpsektif Green HRM. *KarismaPro: Kajian & Riset Manajemen Profesional*, 13(2), 87-98. https://doi.org/10.53675/karismapro.v13i2.1073

Rohaeli, R., Damayanti, S., & Wahyuningsih, S. (2025). Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Berbasis Cbt (Community Based Tourism) Di Wisata Alam Gunung Jae. *Journal Of Responsible Tourism*, 4(3), 773-780. https://doi.org/10.47492/jrt.v4i3.3772

Rudiyanto, R. (2024). Peningkatan pengetahuan masyarakat desa wisata tentang kepariwisataan di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 4(1), 55–63. https://doi.org/10.52352/makardhi.v4i1.1480

Tambahani, J., Langi, Y. A. R., & Wurangian, A. (2023). Pengembangan Dusun Tulaun Minahasa sebagai desa wisata. *MONSU'ANI TANO: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 412–424. DOI: https://doi.org/10.32529/tano.v6i2.2893

Utami, N. P. C. P., Maharani, P. D., & Candra, K. D. P. (2023). Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan paket wisata di DTW Jatiluwih. *BINA CIPTA*, 2(2), 91–102. https://doi.org/10.46837/binacipta.v2i2.37